



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KHAIRIL INDRA**
2. Jabatan : **KEPALA KPPN BUKITTINGGI**
3. NHK : **154850**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 325.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO D1A02N18M1 AT / SEPEDA MOTOR
Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP R AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS 1.5J MT Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA V1J02050L1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIOSATYA1.2ECVTCKD Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 453.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.345.950.000

III. HUTANG Rp. 33.439.242

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.312.510.758



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.